BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam mengkoordinasi Pembangunan Didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin/dikoordinasikan langsung oleh kepala desa. Perencanaan pembangunan didesa Karanggandu melalui musyawarah dari tingkat yang paling bawah yang dekat dengan masyarakat/warga, akan memberikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan saat musyawarah tingkat desa. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa diterapkan dalam tahap perencanaan hal ini diperlukan sebagai komponen untuk menampung usulan masyarakat, efektif dilakuakn setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan desa. Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun. Tahap pelaksanaan pembangunan desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis Peran serta masyarakat didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan sebagian masyarakat membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja diproyek pembangunan desa.

2. Menurut hukum positif bila ditinjau dari Undang -Undang No 6. Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86 Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam mengkoordinasi Pembangunan Didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek bila sudah sesuai, dengan mengkoordinasi semua bawahannya. Dalam pembangunan didesa karanggandu sendiri dilakukan dengan melalui Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pengawasan.
3. Bila ditinjau dari fiqih siyasah sudah sesuai fiqh siyasah Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan desa didessa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, namun dalam hal ini belum maksimal dilaksanakan, Sehingga kurang dapat mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kurangnya koordinasi dengan masyarakat.

Saran

1. Untuk Kelurahan/Desa

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa secara partisipatif menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan fiqih siyasah didesa karanggandu kecamatan wawtulimo kabupaten trenggalek.

2. Untuk Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Secara Partisipatif Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dan Fiqih Siyasah Didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Terutama bagi peneliti yang mengambil judul dan tema yang sama untuk dijadikan referesi dan tambahan materi dalam studinya, dengan harapan untuk menambah data dan pengetahuan dalam kajian hukum tatanegara.